

KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN HAMBATANNYA

Adhienda Syarafina Ghaisani¹, Prabu Gilang Hununggalan²

25040674314@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674331@mhs.unesa.ac.id²

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Perbedaan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil menunjukkan bahwa usaha pemerataan pendidikan masih jauh dari kata berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang memengaruhi keberhasilannya di lokasi terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang mengeksplorasi beragam sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan teori pelaksanaan kebijakan dari George Edward III serta Van Meter dan Van Horn. Temuan kajian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya infrastruktur, distribusi tenaga pengajar yang tidak merata, keterbatasan sarana pendidikan, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Faktor eksternal seperti kondisi geografis dan kesenjangan teknologi turut mempertegas rintangan implementasi kebijakan. Dalam Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan telah disusun untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas dalam memperbaiki efektivitas pelaksanaan kebijakan, guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang lebih adil dan merata di seluruh penjuru Indonesia.

Kata Kunci: Kesenjangan Pendidikan, Pelaksanaan Kebijakan, Daerah Terpencil, Pemerataan Pendidikan, Studi Pustaka.

Abstract

The disparity in education within remote regions remains a significant challenge for educational advancement in Indonesia. Variations in access, quality, and the presence of educational resources between urban centers and isolated locales highlight that endeavors to secure educational equity are still unsuccessful. This research intends to examine the execution of educational equity policies and pinpoint various obstacles that hinder their effectiveness in remote settings. Utilizing a qualitative methodology with a literature review approach, this study investigates a range of sources, including academic journals, books, and documents related to educational policy. The analysis was conducted descriptively, drawing upon the policy implementation frameworks of George Edward III and Van Meter and Van Horn. The results of the study reveal that the enforcement of educational equity policies continues to encounter numerous challenges, such as inadequate infrastructure, uneven allocation of teaching personnel, limited educational resources, and socio-economic influences. Additionally, factors like communication, resource availability, the disposition of implementers, and bureaucratic organization also impact the success of policy execution. External aspects such as geographical positioning and technological disparities further intensify the difficulties related to policy implementation. This study concludes that despite the formulation of numerous policies aimed at addressing educational inequities, their practical application remains suboptimal. Hence, cooperation among the central government, regional authorities, and local communities is essential to enhance the efficacy of policy enactment, striving for a more just and equitable distribution of education across Indonesia.

Keywords: *Education Disparity, Policy Execution, Isolated Areas, Educational Fairness, Literature Analysis.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu fondasi utama dalam kemajuan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya meraih pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan karakter, cara berpikir, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks pembangunan, pendidikan menjadi unsur krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai hak fundamental setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, hak atas pendidikan telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang adil dan berkualitas untuk seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Diharapkan pemerintah mampu menyajikan sistem pendidikan yang inklusif, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah dalam memastikan terpencil, tertinggal, dan terluar. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya untuk merealisasikan pemerataan pendidikan tersebut masih menghadapi beragam tantangan yang kompleks.

Salah satu isu utama dalam sektor pendidikan di Indonesia adalah masih adanya perbedaan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah. Ketidakmerataan ini terlihat jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kawasan perkotaan umumnya memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap, tenaga pendidik yang lebih berkualitas, serta akses terhadap teknologi yang lebih baik. Sebaliknya, daerah pedesaan sering kali menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Situation ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah.

Kesenjangan pendidikan di daerah terpencil tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu penghalang utama dalam akses pendidikan, di mana banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak usia sekolah terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga pendidikan menjadi prioritas yang diabaikan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga menjadi penghalang dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Kondisi ini diperburuk oleh adanya faktor budaya tertentu yang masih ada dalam masyarakat dan mempengaruhi cara pandang terhadap pendidikan.

Di sisi lain, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan pendidikan di daerah terpencil. Banyak sekolah yang masih memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti ruang kelas yang tidak memadai, kurangnya buku dan bahan ajar, serta ketiadaan fasilitas penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan. Selain itu, akses terhadap teknologi informasi juga masih sangat terbatas, sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan optimal, terutama di era digital saat ini. Keterbatasan ini tentu berdampak langsung

terhadap kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Banyak daerah terpencil yang mengalami kekurangan guru, terutama guru dengan kompetensi yang memadai. Dalam beberapa kasus, satu orang guru harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena kurangnya tenaga pengajar. Kondisi ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Selain itu, rendahnya minat tenaga pendidik untuk ditempatkan di daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri, yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas, aksesibilitas yang sulit, serta minimnya insentif yang memadai.

Untuk menangani beragam tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan merupakan bentuk nyata dari upaya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendistribusikan tenaga pendidik ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) serta meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Upaya ini menunjukkan dedikasi pemerintah dalam menekan ketimpangan pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Indonesia.

Namun meskipun beragam kebijakan telah disusun dan diterapkan, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih mengalami berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, penyediaan listrik, dan jaringan internet. Infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan distribusi bantuan pendidikan serta pelaksanaan program menjadi tidak optimal. Selain itu, kondisi geografis yang sulit juga menjadi penghalang dalam menjangkau kawasan-kawasan terpencil.

Selain faktor infrastruktur, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kebijakan yang dirancang di tingkat pusat seringkali tidak sepenuhnya cocok dengan keadaan di daerah, sehingga dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai masalah. Lemahnya sistem pengawasan terhadap implementasi kebijakan juga membuat program-program yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah disusun dengan realitas yang terjadi di lapangan atau yang dikenal dengan istilah *policy gap*.

Policy gap menjadi salah satu isu penting dalam kajian kebijakan publik, karena mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai. Dalam konteks pendidikan di daerah terpencil, *policy gap* terlihat dari masih tingginya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berlangsung secara optimal dan masih memerlukan evaluasi serta perbaikan.

Kesenjangan pendidikan yang terus berlanjut dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing. Selain itu, ketimpangan pendidikan juga dapat memperlebar kesenjangan sosial

dan ekonomi antarwilayah, yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Dalam jangka panjang, kesenjangan pendidikan dapat menghalangi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak merata akan menciptakan ketidakadilan sosial serta memperlemah integrasi nasional. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan di daerah terpencil serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam proses pelaksanaan. Dengan memahami berbagai faktor tersebut, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan di daerah terpencil serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan ketimpangan pendidikan serta implikasinya terhadap pembangunan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam usaha mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, kajian mengenai ketimpangan pendidikan di daerah terpencil menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat pendidikan adalah faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pembangunan nasional. Upaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan kebijakan yang tepat, tetapi juga implementasi yang efektif serta dukungan dari berbagai pihak. Tanpa adanya sinergi yang kokoh antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kesenjangan pendidikan akan terus menjadi masalah yang sulit untuk diatasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*). Pilihan pendekatan kualitatif diambil karena tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dan menganalisis fenomena ketidaksetaraan pendidikan di kawasan terpencil serta penerapan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah secara mendalam dan komprehensif. Metode studi literatur diterapkan dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, khususnya mengenai pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman permasalahan yang dikaji. mendalam mengenai

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelompokkan berbagai informasi yang terdapat dalam literatur yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup kegiatan membaca, mencatat, dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai ketidaksetaraan pendidikan di daerah terpencil serta penerapan kebijakan yang dilakukan.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III serta Van Meter dan Van Horn sebagai dasar analisis. Teori tersebut digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai kendala dalam penerapan kebijakan pemerataan pendidikan di daerah terpencil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui pendekatan studi literatur, terungkap bahwa ketidakmerataan pendidikan di wilayah terpencil tetap menjadi isu yang rumit dan belum sepenuhnya teratasi. Ketidakmerataan ini diperlihatkan oleh adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam hal akses, kualitas, serta fasilitas pendidikan antara kawasan perkotaan dan kawasan terpencil.

Salah satu penemuan utama dalam kajian ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil. Banyak sekolah yang masih menghadapi kondisi fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang kelas yang tidak layak, kekurangan buku pelajaran, serta minimnya sarana pendukung seperti perpustakaan dan media pembelajaran. Situasi tersebut secara langsung berdampak pada kualitas proses pembelajaran, di mana siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal. Di samping itu, keterbatasan fasilitas juga mengakibatkan rendahnya motivasi belajar siswa dan meningkatkan risiko terjadinya putus sekolah, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Selain keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pengajar juga menjadi faktor utama yang menimbulkan ketidakmerataan pendidikan di daerah terpencil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik belum merata, sehingga banyak sekolah di wilayah terpencil kekurangan guru. Keadaan ini menimbulkan beban kerja guru yang lebih berat, di mana seorang guru harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pembelajaran, karena guru tidak dapat fokus pada satu bidang keahlian tertentu.

Lebih lanjut, kondisi geografis yang sukar dijangkau juga menjadi faktor yang memperburuk ketidakmerataan pendidikan. Banyak daerah terpencil yang memiliki akses transportasi terbatas, sehingga menyulitkan distribusi sarana pendidikan dan penempatan tenaga pengajar. Keadaan ini menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan fasilitas pendidikan serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Di sisi lain, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk menangani ketidakmerataan pendidikan

melalui kebijakan pemerataan pendidikan. Kebijakan tersebut meliputi pembangunan sarar dan prasarana pendidikan, pemberian bantuan pendidikan, serta program penempatan tenaga pendidik di daerah terpencil. Implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif, seperti meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat serta adanya perbaikan dalam proses pembelajaran di beberapa daerah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak positif dari kebijakan tersebut belum merata di seluruh wilayah terpencil. Masih terdapat daerah yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan menyebabkan tujuan kebijakan belum tercapai secara yang optimal.

2. Pembahasan

Berdasarkan temuan dari studi ini, dapat dianalisis bahwa ketidakmerataan pendidikan di wilayah terpencil merupakan hasil dari belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara rencana yang telah dibuat dengan situasi nyata di lapangan.

Dalam hal komunikasi, pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi tantangan dalam penyampaian informasi kepada pelaksana di tingkat daerah. Kurangnya sosialisasi kebijakan menyebabkan pelaksana tidak sepenuhnya memahami tujuan dan mekanisme dari kebijakan yang seharusnya diterapkan. Sebagai akibatnya, program-program yang telah dirancang tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi terkait kebijakan belum berjalan dengan efektif.

Selanjutnya, dari sudut pandang sumber daya, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang tidak mencukupi mengakibatkan kebijakan yang telah disusun tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Selain itu, terbatasnya anggaran juga menjadi hambatan dalam mendukung implementasi kebijakan di daerah yang terpencil.

Dari segi disposisi atau sikap pelaksana, rendahnya minat tenaga pendidik untuk ditempatkan di daerah terpencil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menemukan tantangan dari aspek sumber daya manusia. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya fasilitas, kondisi geografis yang sulit, serta minimnya insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik. Kondisi ini menjadikan kebijakan penempatan guru belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga. Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara efektif. Selain itu, prosedur birokrasi yang rumit juga dapat memperlambat proses pelaksanaan kebijakan.

Jika dianalisis lebih mendalam, kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, serta keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan geografis. Meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan tujuan tersebut belum tercapai secara optimal.

Kondisi lingkungan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Faktor sosial dan budaya turut berperan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan di daerah

terpencil masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beragam rintangan yang berdampak pada keberhasilan kebijakan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dan realitas yang ada di lapangan (*policy gap*), sehingga perlu langkah yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidakmerataan pendidikan di kawasan terpencil masih merupakan masalah yang rumit dan belum sepenuhnya teratasi. Ketidakmerataan ini ditandai oleh perbedaan signifikan dalam akses, mutu, dan sarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Situasi ini menunjukkan bahwa distribusi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian mendalam.

Faktor utama yang memicu ketidakmerataan pendidikan di daerah terpencil mencakup keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, serta kondisi geografis yang sukar dijangkau. Selain itu, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat juga berperan dalam rendahnya tingkat partisipasi pendidikan. Keterbatasan dalam fasilitas dan sumber daya berimbas pada rendahnya mutu proses pembelajaran serta meningkatnya risiko putus sekolah.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan melalui kebijakan pemerataan pendidikan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta program penempatan tenaga pengajar di daerah terpencil. Kebijakan tersebut pada dasarnya telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Berdasarkan analisis pelaksanaan kebijakan, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Keterbatasan dalam aspek-aspek tersebut membuat kebijakan yang telah dirumuskan belum dapat mencapai tujuan secara maksimal. Di samping itu, faktor eksternal seperti kondisi geografis, ekonomi, dan budaya sosial juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakmerataan pendidikan di daerah terpencil tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian serta rangkuman yang telah disampaikan, terdapat sejumlah saran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil.

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan dan distribusi sarana serta prasarana pendidikan di daerah terpencil. Penyediaan fasilitas pendidikan yang sesuai, seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, serta alat bantu pembelajaran yang mendukung, sangat krusial untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi, listrik, dan jaringan internet juga harus dipertimbangkan agar distribusi fasilitas pendidikan

dapat berlangsung dengan lebih optimal.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat kebijakan terkait pemerataan tenaga pendidik, khususnya di wilayah terpencil. Upaya yang dapat dilakukan termasuk memberikan insentif, fasilitas tambahan, serta jaminan kesejahteraan bagi pendidik yang bersedia ditempatkan di lokasi tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan minat tenaga pendidik untuk mengajar di daerah terpencil dapat meningkat, sehingga kekurangan guru dapat teratasi.

Ketiga, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efisien sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keempat, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik. Peningkatan kompetensi guru akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran yang lebih baik, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah.

Kelima, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dukungan terhadap kegiatan belajar mengajar, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan setempat. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Keenam, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi sosial dalam mendukung pemerataan pendidikan. Dukungan dari berbagai pihak bisa berupa bantuan fasilitas pendidikan, program pelatihan, maupun pengembangan teknologi pembelajaran yang dapat menjangkau daerah terpencil.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di daerah terpencil dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahyanti, N. D. (2025). Analisis kebijakan dalam mengatasi problematika pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam 2(1), 87-100.
- Dalimunthe, M. H. (2025). Solusi Krisis Pendidikan di Daerah 3T. El Banar; Jurnal Pendidikan dan Pengajaran 8(1), 1-10.
- Fatin, H. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerataan Bagi Anak Miskin di RA Al- Amin, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan 11(3), 79-98.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2(1), 53-64.
- Indonesia, K. P. (2020). Strategi nasional peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.
- Indonesia, R. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.
- Kompasiana. (2023). kesenjangan akses pendidikan di Indonesia menghalangi kesetaraan dan kemajuan.
- Kompasiana. (2023). Pendidikan belum merata hingga seluruh Indonesia.

- Lailiyah, Z. N. (2024). Isu-isu ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia: Strategi pemerintahan dalam mengatasi ketidaksetaraan terhadap pendidikan di Indonesia . *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1(4), 12-15.
- Ramadani, R. &. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan di Daerah 3T . *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 10(1), 15-28.
- Sandriani, A. &. (2025). kebijakan Pemerintahan dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan . *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9(2), 15165-15169.
- Septiana, N. S. (2024). Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2(6), 112-121.
- Setiawan, E. H. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan . *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran, dan Ilmu Sosial* 2(4), 29-38.
- Sihombing, R. S. (2022). Pemerataan pendidikan: Studi kasus 34 provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review* 1(2), 143-151.
- Tarsidi, D. (2016). Kesempatan dan Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Pendidikan . 1-18.
- UNESCO. (2000). Indeks Pembangunan Manusia: Laporan Dunia tentang Pendidikan dan Kesehatan. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
- Zulkarnaen, A. D. (2019). Faktor- faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 20-24.